



**DETERMINAN KEMANDIRIAN DAERAH KOTA/KABUPATEN DI WILAYAH
KERJA BADAN KOORDINASI WILAYAH I MADIUN TAHUN ANGGARAN 2017-2021**

Oleh

Seno Sawiji Ramadani¹, Susanti Usman²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

e-mail: ¹senosawijiramadani@gmail.com, ²susanti_usman@staff.gunadarma.ac.id

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah adalah komponen utama dari suatu Kemandirian Daerah yang kuat, tetapi pemerintah daerah tidak bisa lepas dari dana transfer pusat yang dua porsi terbesarnya adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh simultan dan parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Daerah pada Bakorwil I Madiun Tahun Anggaran 2017-2021. Metode penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data sekunder yang diperoleh dari website www.djpk.depkeu.go.id dan website pemerintah terkait. Sampel penelitian ini terdiri dari seluruh Kota/Kabupaten yang berada pada wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah I Madiun dengan periode 5 tahun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang diolah menggunakan EVIEWS versi 13. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah sedangkan Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah. Pendapatan Asli Daerah teridentifikasi sebagai variabel paling berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Kemandirian Daerah, Badan Koordinasi Wilayah

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat telah memberikan pemerintah daerah otoritas untuk secara independen mengatur dan mengurus masalah pemerintahan serta kebutuhan masyarakat di wilayah mereka. Kemandirian daerah menjadi landasan hukum yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

**Pendapatan Asli Daerah Badan
Kota/Kabupaten di Koodinasi Wilayah I
Madiun
Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan
2017	Rp 3.054.781.751.075,00	Rp 18.474.696.343.164,00
2018	Rp 2.757.718.853.356,00	Rp 19.505.137.575.236,00
2019	Rp 2.768.555.138.034,50	Rp 18.664.393.071.481,40
2020	Rp 2.978.214.158.626,45	Rp 19.258.128.593.503,00
2021	Rp 3.855.859.817.629,75	Rp 20.611.592.486.899,40

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/> dan Data diolah 2023

Tabel 1.1



Berdasarkan Gambar 1.2 Seluruh daerah di Badan Koodinasi Wilayah I Madiun menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang berbeda tiap tahunnya. Tahun 2021 menjadi tahun di mana Kota Madiun menghasilkan Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu sebesar Rp3.855.859.817.629,75, sedangkan tahun 2019 menjadi tahun Pendapatan Asli Daerah terendah yaitu sebesar Rp2.757.718.853.356,00. Dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian daerah yang tertinggi hanya 18,71% pada 2021.

Kabupaten/Kota pada Badan Koodinasi Wilayah I Madiun dan menggunakan 3 variabel independent yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu Kemandirian Daerah pada Tahun Anggaran 2017-2021, Peneliti tidak memasukkan data Tahun Anggaran 2022 karena data belum tersedia lengkap di website <https://djpk.kemenkeu.go.id/> dan website pemerintah daerah terkait.

TELAAH PUSTAKA

Kajian Teori

Akuntansi Sektor Publik

Proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu entitas publik sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi. Menurut Bastian (2014:6) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat.

Nilai Uang (*Value For Money*)

Konsep *Value For Money* (VFM) yang sangat penting untuk sektor publik, *value for money* sendiri merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi (Halim & Kusufi, 2013:132).

Akuntansi Pemerintahan

Menurut Halim (2013:38) Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemeritahan adalah akuntansi yang melibatkan aspek keuangan negara dari perencanaan anggaran hingga pelaporan, dengan tujuan memberikan informasi keuangan kepada berbagai pihak untuk pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak yang berkepentingan.

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sujarweni (2015:231) juga menjelaskan tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah sebagai berikut:

1. Mencegah pemusatan kekuasaan.
2. Terciptanya pemerintah yang efektif dan efisien.
3. Masyarakat dapat lebih berpartisipasi langsung dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.
4. Adanya kesetaraan politik.
5. Setiap daerah dituntut untuk dapat bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing.

Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 1, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka



penyelenggaraan pemerintahan daerah. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, efektivitas, transparan dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah

Rencana operasional keuangan pmda dimana suatu pihak menggambarkan pengeluaran yang tinggi guna membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu. Menurut Akbar (2013:110) APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber ekonomi di wilayahnya yang ditarik sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana Alokasi Umum dan Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 47 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 48 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Halim, 2013:5). Rasio kemandirian daerah adalah ukuran untuk mengukur sejauh mana suatu daerah bisa mengatur keuangan dan mengelola urusan pemerintahnya tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, rumus Kemandirian Daerah :

$$Kemandirian\ Daerah = \frac{Total\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan}$$

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dari kota/kabupaten yang termasuk ke dalam Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I Madiun Tahun Anggaran 2017-2021. Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Bakorwil I Madiun Tahun Anggaran 2017-2021.

Prosedur Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Studi Kepustakaan yang didapatkan terkait dengan topik penelitian didapat dari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan sumber lainnya yang relevan.
2. Dokumentasi, dengan cara mengumpulkan data berupa informasi laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017-2021 milik pemerintah daerah pada Bakorwil I Madiun yang sudah dipublikasikan di website resmi



Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan website resmi pemerintah daerah terkait.

Identifikasi Variabel

Variabel Dependen (Y), dalam penelitian ini adalah Kemandirian Keuangan Daerah yang bisa didapat dengan rumus :

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.

Variabel Independen (X), Variabel Independen adalah variabel yang digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi nilai variabel lain yaitu variabel dependen (Widarjono, 2015:2). Penelitian ini membatasi dengan hanya menggunakan 3 Variabel Independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Teknis Analisis

Analisis data menggunakan analisis regresi data panel yang berguna untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Daerah. Penelitian ini menggunakan aplikasi EVIEWS versi 13 sebagai alat bantu untuk mengolah data.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis kuantitatif, dengan hasil analisis dalam bentuk tabel frekuensi berdasarkan sebuah variabel atau indikator masalah atau tabel frekuensi berdimensi N, yang merupakan *Descriptive Statistical Summaries* atau rangkuman statistik deskriptif (Agung, 2014:1).

Analisis Regresi Data Panel

Kombinasi dari data *time series* dan *cross-section*. Analisis data panel regresi

adalah teknik yang digunakan untuk memodelkan bagaimana variabel prediktor berpengaruh terhadap variabel respons dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen (Priyatno, 2022:67). Syarat-syarat penerimaan atau penolakan suatu model penelitian dicantumkan di bawah ini:

1. Jika nilai Probabilitas $F > 0,05$ maka model penelitian dikatakan tidak layak digunakan.
2. Jika nilai Probabilitas $F < 0,05$ maka model penelitian dikatakan layak digunakan.

Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2022:124). Menurut Ghazali (2021:219) uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t ini melibatkan perbandingan antara estimasi nilai koefisien dengan standar kesalahannya, dengan tujuan untuk menentukan apakah nilai koefisien tersebut memiliki signifikansi secara statistik.

1. Jika probabilitas $> \alpha = 0,05$ maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
2. Jika probabilitas $< \alpha = 0,05$ maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengukur presentase total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independennya (Widarjono, 2015:17). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variasi



variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2021:147).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dari Kota dan Kabupaten dalam Badan Koordinasi Wilayah I Madiun Tahun Anggaran 2017-2021. Tugas Badan Koordinasi Wilayah Membantu Gubernur dalam melakukan Koordinasi, Pembinaan, Pembangunan dan Tugas Pembantuan. Bakorwil I Madiun memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

Tabel 4.1

Kota/Kabupaten di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah I Madiun

No	Nama Daerah
1	Kota Madiun
2	Kota Kediri
3	Kabupaten Madiun
4	Kabupaten Magetan
5	Kabupaten Ngawi
6	Kabupaten Ponorogo
7	Kabupaten Pacitan
8	Kabupaten Kediri
9	Kabupaten Tulungagung
10	Kabupaten Trenggalek

Sumber:

<https://bakorwilmadiun.jatimprov.go.id/> dan Data diolah, 2023

Bakorwil I Madiun mencakup wilayah seluas 9.404,26 kilometer persegi, yang setara dengan sekitar 19,67% dari total luas Provinsi Jawa Timur (sumber: <https://jatim.bps.go.id/>, 2021). Karena Bakorwil I Madiun terdiri dari beragam daerah, ini membuka berbagai pilihan tempat wisata, termasuk Monumen Kresek di Kabupaten Madiun, Pantai Klayar di Kabupaten Pacitan, Monumen Simpang Gumul di Kabupaten Kediri, Taman Geni Langit di Kabupaten Magetan, Candi Dadi dan Candi Sangrahan di Kabupaten Trenggalek.

Data Penelitian

Berikut disajikan rangkuman Laporan Realisasi Anggaran pada Kota/Kabupaten di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Madiun Tahun Anggaran 2017-2021 yang diperoleh dari website resmi pemerintah yaitu www.djpk.depkeu.go.id:

Tabel 4.2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (Dalam Triliun Rupiah)

Daerah	Tahun	PAD	DAU	DAK	Total Pendapatan	KMD (%)
Kota Madiun	2017	0,231	0,502	0,077	0,957	24,081
	2018	0,231	0,501	0,071	1,007	22,914
	2019	0,252	0,522	0,076	1,094	23,031
	2020	0,249	0,473	0,072	1,059	23,487
	2021	0,265	0,465	0,072	1,101	24,160
Kota Kediri	2017	0,293	0,606	0,123	1,239	23,651
	2018	0,249	0,606	0,111	1,278	19,483
	2019	0,267	0,637	0,121	1,339	19,915
	2020	0,263	0,579	0,137	1,283	20,488
	2021	0,440	0,569	0,107	1,508	29,155
Kab. Madiun	2017	0,241	0,877	0,249	1,758	13,762
	2018	0,219	0,877	0,303	1,829	11,972
	2019	0,229	0,904	0,311	1,947	11,772
	2020	0,258	0,819	0,268	1,842	14,015
	2021	0,333	0,808	0,327	1,978	16,839
Kab. Magetan	2017	0,212	0,899	0,287	1,757	12,106
	2018	0,196	0,899	0,278	1,828	10,763
	2019	0,237	0,935	0,285	1,936	12,258
	2020	0,203	0,848	0,269	1,801	11,292
	2021	0,244	0,837	0,263	1,896	12,854
Kab. Ngawi	2017	0,275	1,039	0,302	1,996	13,809
	2018	0,223	1,039	0,334	2,078	10,773
	2019	0,255	1,072	0,336	2,202	11,584
	2020	0,269	0,981	0,319	2,129	12,677
	2021	0,283	0,966	0,376	2,226	12,740



Kab. Ponorego	2017	0,308	1,045	0,525	2,215	15,914
	2018	0,289	1,038	0,405	2,3	12,564
	2019	0,291	1,088	0,341	2,335	12,464
	2020	0,303	0,992	0,318	2,251	13,471
	2021	0,376	0,979	0,322	2,327	16,187
Kab. Pacitan	2017	0,202	0,793	0,234	1,441	14,015
	2018	0,185	0,793	0,277	1,788	10,352
	2019	0,199	0,817	0,293	1,718	11,580
	2020	0,169	0,739	0,283	1,624	10,369
	2021	0,212	0,731	0,288	1,695	12,488
Kab. Kediri	2017	0,533	1,220	0,372	2,718	19,643
	2018	0,476	1,225	0,406	2,867	16,629
	2019	0,267	0,637	0,121	1,339	19,915
	2020	0,494	1,166	0,378	2,835	17,438
	2021	0,514	1,149	0,474	2,923	17,576
Kab. Tuhungagung	2017	0,503	1,151	0,376	2,598	19,364
	2018	0,453	1,151	0,438	2,701	16,774
Daerah	Tahun	PAD	DAU	DAK	Total Pendapatan	KMD (%)
	2019	0,486	1,192	0,397	2,762	17,605
	2020	0,511	1,079	0,382	2,598	19,649
	2021	0,953	1,062	0,364	3,095	30,811
Kab. Trenggalek	2017	0,253	0,885	0,251	1,791	14,133
	2018	0,233	0,885	0,291	1,824	12,816
	2019	0,285	0,916	0,316	1,991	14,322
	2020	0,258	0,834	0,286	1,831	14,088
	2021	0,233	0,823	0,285	1,859	12,554

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id dan Data diolah, 2023

Keterangan

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

KMD : Kemandirian Daerah

Pembahasan

Analisis Deskriptif

Tabel 4.3
Hasil Analisis Deskriptif

	PAD	DAU	DAK	KMD
Mean	0.308060	0.872960	0.273940	0.162061
Median	0.260500	0.885000	0.289500	0.140516
Maximum	0.953000	1.225.000	0.474000	0.308107
Minimum	0.169000	0.465000	0.071000	0.103525
Std. Dev.	0.136803	0.212736	0.106339	0.049799
Observations	50	50	50	50

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13, 2023

Keterangan

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

KMD : Kemandirian Daerah

Hasil Model Regresi Data Panel

Common effect model menganggap hasil analisis regresi berlaku untuk semua objek dan waktu, tidak memfokuskan pada dimensi individu dan waktu, serta mengasumsikan perilaku data seragam di seluruh perusahaan dari waktu ke waktu.

Tabel 4.8

Hasil *Common Effect Model*

Dependent Variable: KMD

Method: Panel Least Squares

Date: 09/05/23 Time: 19:22

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.186891	0.010016	18.65956	0.0000
PAD	0.347085	0.015071	23.02962	0.0000
DAU	-0.051598	0.025843	-1.996596	0.0518
DAK	-0.316532	0.049447	-6.401461	0.0000
R-squared	0.942169	Mean dependent var	0.162061	
Adjusted R-squared	0.938397	S.D. dependent var	0.049799	
S.E. of regression	0.012360	Akaike info criterion	-5.872097	
Sum squared resid	0.007027	Schwarz criterion	-5.719135	
Log likelihood	150.8024	Hannan-Quinn criter.	-5.813848	
F-statistic	249.8072	Durbin-Watson stat	1.276906	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13, 2023

Fixed effect model adalah pendekatan dalam analisis data panel di mana perbedaan antar individu diwakili oleh perbedaan dalam konstanta dan koefisien regresi tetap dari waktu ke waktu.



Tabel 4.9
Hasil Fixed Effect Model

Dependent Variable: KMD
Method: Panel Least Squares
Date: 09/05/23 Time: 19:30
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.180834	0.014624	12.36528	0.0000
PAD	0.281974	0.017271	16.32671	0.0000
DAU	-0.072037	0.024026	-2.998310	0.0048
DAK	-0.156066	0.044014	-3.545798	0.0011

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.977133	Mean dependent var	0.162061
Adjusted R-squared	0.969716	S.D. dependent var	0.049799
S.E. of regression	0.008666	Akaike info criterion	-6.439916
Sum squared resid	0.002779	Schwarz criterion	-5.942790
Log likelihood	173.9979	Hannan-Quinn criter.	-6.250608
F-statistic	131.7530	Durbin-Watson stat	2.063751
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13, 2023

Random effect model Model ini mengatasi ketidakpastian yang muncul dalam metode efek tetap dengan menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan objek.

Tabel 4.10
Hasil Random Effect Model

Dependent Variable: KMD
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/05/23 Time: 19:36
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 50
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.189837	0.008657	21.92901	0.0000
PAD	0.330284	0.012703	26.00095	0.0000
DAU	-0.063920	0.019882	-3.214988	0.0024
DAK	-0.269123	0.038167	-7.051234	0.0000

Effects Specification

Cross-section random			
		S.D.	Rho
		0.004053	0.1795
Idiosyncratic random			
		0.008666	0.8205

Weighted Statistics

R-squared	0.920497	Mean dependent var	0.112003
Adjusted R-squared	0.915312	S.D. dependent var	0.038113
S.E. of regression	0.011091	Sum squared resid	0.005659
F-statistic	177.5312	Durbin-Watson stat	1.299411
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.938563	Mean dependent var	0.162061
Sum squared resid	0.007466	Durbin-Watson stat	0.984941

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13, 2023

Pemilihan Model Regresi Data Panel Uji Chow

Tabel 4.11
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.285845	(9,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	46.390986	9	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13, 2023



Uji Haussman

Uji Haussman digunakan untuk menentukan model mana yang lebih cocok antara *Fixed Effect* atau *Random Effect* dalam analisis data. Uji Haussman yang dilakukan dengan software EVIEWS versi 13 sebagai berikut.

Tabel 4.12
Hasil Uji Haussman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	32.350300	3	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13, 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh nilai probabilitas (prob) pada *Cross Section* Random sebesar $0,000 < 0,05$, hal ini berarti model yang lebih baik digunakan adalah *Fixed Effect* dibandingkan *Random Effect*. Pengujian akan berlanjut ke Uji Langrange Multiplier.

Hasil Pemilihan Model Terbaik

Berdasarkan dari pengolahan estimasi data panel diperoleh model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Fixed Effect Model* pada tabel 4.9.

Tabel 4.13
Fixed Effect Model

Dependent Variable: KMD
Method: Panel Least Squares
Date: 09/05/23 Time: 19:30
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.180834	0.014624	12.36528	0.0000
PAD	0.281974	0.017271	16.32671	0.0000
DAU	-0.072037	0.024026	-2.998310	0.0048
DAK	-0.156066	0.044014	-3.545798	0.0011

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.977133	Mean dependent var	0.162061
Adjusted R-squared	0.969716	S.D. dependent var	0.049799
S.E. of regression	0.008666	Akaike info criterion	-6.439916
Sum squared resid	0.002779	Schwarz criterion	-5.942790
Log likelihood	173.9979	Hannan-Quinn criter.	-6.250608
F-statistic	131.7530	Durbin-Watson stat	2.063751
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13, 2023

Hasil uji regresi dengan *Fixed Effect Model* didapatkan persamaa regresi sebagai berikut.

$$\text{KMD} = 0.180834 + 0.281974 \cdot \text{PAD} - 0.072037 \cdot \text{DAU} - 0.156066 \cdot \text{DAK} + [\text{CX}=\text{F}]$$

Keterangan

- KMD : Kemandirian Daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah
DAU : Dana Alokasi Umum
DAK : Dana Alokasi Khusus
[CX=F] : Syntax

Dari hasil persamaan regresi tersebut, maka masing-masing variabel dapat diinterpretasikan hubungannya dengan tingkat kemandirian sebagai berikut:

1. Kemandirian Daerah memiliki nilai 0,180834, yang mengartikan bahwa jika variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dianggap tetap atau tidak berubah (sama dengan 0), maka tingkat kemandirian akan mengalami kenaikan sebesar 0,180834 atau 18,08%.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan angka sebesar 0,281974. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 triliun rupiah dalam Pendapatan Asli Daerah akan berdampak pada peningkatan Kemandirian Daerah sebesar 0,281974 atau 28,20%, dengan anggapan bahwa semua faktor independen lainnya tidak mengalami perubahan.

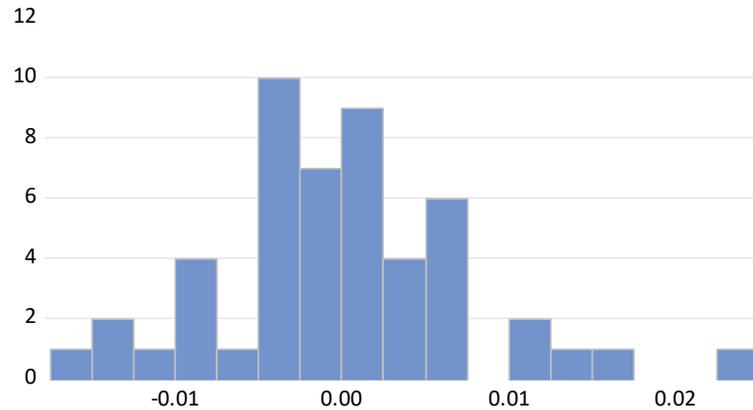


3. Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai negatif sebesar 0,072037. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 triliun rupiah dalam Dana Alokasi Umum akan berdampak pada penurunan Kemandirian Daerah sebesar 0,072037 atau 7,2%, dengan anggapan bahwa semua faktor independen lainnya tidak mengalami perubahan.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan angka negatif sebesar 0,156066. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 triliun rupiah dalam Dana Alokasi Khusus akan berdampak pada penurunan Kemandirian Daerah sebesar 0,156066 atau 15,61%, dengan anggapan bahwa semua faktor independen lainnya tidak mengalami perubahan.
5. Teridentifikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh paling kuat terhadap Kemandirian Daerah, hal ini terlihat dari nilai koefisiennya yang terbesar.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan dari pengujian normalitas adalah untuk memeriksa apakah variabel gangguan atau residual dalam model regresi memiliki distribusi yang normal. Seperti yang kita ketahui, dalam pengujian t, diasumsikan bahwa nilai residu mengikuti distribusi normal. Namun, jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka uji statistik tersebut menjadi tidak sah saat digunakan untuk sampel dengan jumlah yang kecil. Hasil uji normalitas data dengan menggunakan EVIEWS versi 13 sebagai berikut.



Sumber: Data diolah dengan EVIEWS 13, 2023

Gambar 4.5
Hasil Uji Normalitas Histogram

Berdasarkan informasi dari gambar 4.5, terlihat bahwa nilai probability didapatkan sebesar 0,139340, nilai ini melebihi batas signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 ($0,139340 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. Pengujian ini dapat dilihat dari multikolinearitas nilai $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan EVIEWS versi 13 sebagai berikut.

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000100	32.83325	NA
PAD	0.000227	8.418649	1.363500
DAU	0.000668	176.2686	9.694530
DAK	0.002445	68.91973	8.867942

Sumber: Data diolah dengan EVIEWS 13, 2023

Berdasarkan tabel 4.14, hasil uji multikolinearitas menggunakan EVIEWS menunjukkan bahwa



1. Variabel Pendapatan Asli Daerah nilai VIF sebesar $1,363500 < 10$, maka variabel Pendapatan Asli Daerah tidak terjadi multikolinearitas.
2. Variabel Dana Alokasi Umum nilai VIF sebesar $9,694530 < 10$, maka variabel Dana Alokasi Umum tidak terjadi multikolinearitas.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus nilai VIF sebesar $8,867942 < 10$, maka variabel Dana Alokasi Khusus tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi, tidak ditemukan indikasi adanya masalah multikolinearitas di antara variabel independen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat hubungan antara gangguan kesalahan pada periode t dengan gangguan kesalahan pada periode sebelumnya, yaitu $t-1$. Jika terdapat korelasi tersebut, maka terdapat masalah autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi dengan metode Durbin-Watson menggunakan EViews versi 13 tercatat sebagai berikut.

Tabel 4.15
Hasil Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.977133	Mean dependent var	0.162061
Adjusted R-squared	0.969716	S.D. dependent var	0.049799
S.E. of regression	0.008666	Akaike info criterion	-6.439916
Sum squared resid	0.002779	Schwarz criterion	-5.942790
Log likelihood	173.9979	Hannan-Quinn criter.	-6.250608
F-statistic	131.7530	Durbin-Watson stat	2.063751
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah dengan EViews 13, 2023

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa angka Durbin-Watson (DW) memiliki nilai 2,063. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%,

jumlah sampel 50 (n) dan jumlah variabel independen 3 ($k = 3$), maka ditabel Durbin-Watson diperoleh nilai $dL = 1,4206$ dan $dU = 1,6739$. Oleh karena nilai $DW = 1,422$ lebih besar dari batas atas $dU = 1,6739$ dan kurang dari $4 - 1,6739$ ($4 - dU$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji statistik jika varian residual tetap, itu disebut homoskedastisitas; jika berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik memiliki homoskedastisitas, karena ini penting untuk estimasi parameter yang andal dan hasil pengujian hipotesis yang akurat dalam analisis regresi.

Tabel 4.16
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	11.55638	Prob. F(3,46)	0.0000
Obs*R-squared	21.48847	Prob. Chi-Square(3)	0.0001
Scaled explained SS	20.95414	Prob. Chi-Square(3)	0.0001

Sumber: Data diolah dengan EViews 13, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 4.16, didapatkan nilai Prob. Chi-Square pada Obs*R-squared sebesar 0,0001. Nilai lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Uji Hipotesis

Uji F (Uji Simultan)

Uji F adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah sekumpulan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara keseluruhan (simultan) terhadap variabel dependen dalam analisis regresi.



Tabel 4.17
Hasil Uji F

F-statistic	131.7530
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah dengan EVIEWS 13, 2023

Berdasarkan Tabel 4.17 di atas, hasil uji F didapat nilai *probability* sebesar $0,00 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Daerah (KMD).

Uji t (Uji Parsial)

Uji t merujuk pada suatu teknik statistik yang diterapkan untuk menilai apakah koefisien regresi dalam analisis regresi memiliki signifikansi atau nilai penting. Berikut hasil uji t menggunakan EVIEWS 13:

Tabel 4.18
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.180834	0.014624	12.36528	0.0000
PAD	0.281974	0.017271	16.32671	0.0000
DAU	-0.072037	0.024026	-2.998310	0.0048
DAK	-0.156066	0.044014	-3.545798	0.0011

Sumber: Data diolah dengan EVIEWS 13, 2023

Berdasarkan tabel 4.18, kita dapat menguraikan hasil uji statistik t untuk setiap variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, ditemukan pada variabel Pendapatan Asli Daerah nilai t hitung sebesar 16,32671 dan nilai probabilitas sebesar 0,000, dimana nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_1 diterima. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.
2. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, ditemukan pada variabel Dana Alokasi Umum bahwa nilai t hitung sebesar -

2,998310 dan nilai probabilitas sebesar 0,0048, dimana nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_2 diterima. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

3. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, ditemukan pada variabel Dana Alokasi Khusus bahwa nilai t hitung sebesar signifikansi -3,545798 dan nilai probabilitas sebesar 0,0011, dimana nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_3 diterima. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

Uji Koefisien Determinasi

Mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi. Nilai mendekati 1 menandakan penjelasan yang baik, sementara nilai mendekati 0 menandakan penjelasan yang terbatas.

Tabel 4.19
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.977133
Adjusted R-squared	0.969716

Sumber: Data diolah dengan EVIEWS 13, 2023

Nilai adjusted R-Squared tercatat sekitar 0,970 atau setara dengan 97%. Hal ini berarti bahwa variabel independen, yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, mampu menjelaskan sekitar 97% dalam kemandirian daerah. Sebagian sisanya, sebesar 3%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Rangkuman Hasil Penelitian

Dari hasil pengujian yang telah dijelaskan, dapat dirangkum bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,



dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Daerah Kota/Kabupaten Di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah I Madiun Tahun Anggaran 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20
Rangkuman Hasil Penelitian

Variabel Independen	Kemandirian Daerah (KMD)			Kesimpulan
	Hasil Uji			
	Nilai Prob	Taraf Sig	Hipotesis	
PAD, DAU, dan DAK	0,0000	0,05	H1 diterima H0 ditolak	Berpengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,0000	0,05	H2 diterima H0 ditolak	Berpengaruh
Dana Alokasi Umum (DAU)	0,0048	0,05	H3 diterima H0 ditolak	Berpengaruh
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,0011	0,05	H4 diterima H0 ditolak	Berpengaruh

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus termasuk komponen pendapatan dalam laporan realisasi anggaran sehingga memengaruhi Kemandirian Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Aisyah (2019) serta Musfirati & Sugiyanto (2021) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

Pendapatan Asli daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat juga meningkatkan Kemandirian Daerah Kota/Kabupaten Badan Koordinasi Wilayah I Madiun Tahun Anggaran 2017-2021. Hal ini disebabkan melalui berbagai upaya seperti penerapan pajak, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta penjualan kekayaan daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan. Hasil penelitian ini sejalan Afifah & Haryanto (2019) serta Ahmad

(2021), yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah. Peningkatan Dana Alokasi Umum menurunkan Kemandirian Daerah Kota/Kabupaten Badan Koordinasi Wilayah I Madiun Tahun Anggaran 2017-2021. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Umum termasuk kedalam dana perimbangan yang jika meningkat, akan memperkecil porsi Pendapatan Asli Daerah pada total pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Musfirati & Sugiyanto (2021) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemandirian Daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Aisyah (2019) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah. Peningkatan Dana Alokasi Khusus menurunkan Kemandirian Daerah Kota/Kabupaten Badan Koordinasi Wilayah I Madiun Tahun Anggaran 2017-2021. Dana Alokasi Khusus termasuk kedalam dana perimbangan yang jika meningkat, akan memperkecil porsi Pendapatan Asli Daerah pada total pendapatan, sehingga dapat memperkecil Kemandirian Daerah. Hasil Penelitian ini sejalan dengan Riyadi (2022) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Ahmad (2021) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.



1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Kemandirian Daerah Kota/Kabupaten di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah I Madiun Tahun Anggaran 2017-2021. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus termasuk komponen pendapatan dalam laporan realisasi anggaran sehingga memengaruhi Kemandirian Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Daerah Kota/Kabupaten di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah I Madiun Tahun Anggaran 2017-2021. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah yaitu meningkatkan Kemandirian Daerah. Hal ini dikarenakan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui penerapan pajak, retribusi, pengelolaan aset, dan penjualan kekayaan daerah.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Daerah Kota/Kabupaten di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah I Madiun Tahun Anggaran 2017-2021. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah yaitu menurunkan Kemandirian Daerah. Hal ini dikarenakan kenaikan Dana Alokasi Umum yang mengurangi bagian Pendapatan Asli Daerah dalam total pendapatan, sehingga mengurangi Kemandirian Daerah.
4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Daerah Kota/Kabupaten di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah I Madiun Tahun Anggaran 2017-2021. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah yaitu menurunkan Kemandirian Daerah. Hal ini dikarenakan kenaikan Dana Alokasi Khusus yang mengurangi bagian Pendapatan Asli Daerah

dalam total pendapatan, sehingga mengurangi Kemandirian Daerah.

5. Pendapatan Asli Daerah teridentifikasi sebagai variabel yang paling berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah Kota/Kabupaten di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah I Madiun Tahun Anggaran 2017-2021.

6.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang sudah dijabarkan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Bakorwil Madiun Pemanfaatan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan potensi daerah, sehingga dana-dana tersebut dapat berputar dan menghasilkan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah yang akan memengaruhi peningkatan Kemandirian Daerah. Bakorwil I Madiun bisa mengalokasikan dana transfer tersebut kepada sektor yang kecil seperti pengadaan listrik dan gas, ataupun lebih memaksimalkan sektor yang paling menonjol yaitu industri pengolahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya Peneliti dapat menambah periode lebih dari 5 tahun agar sampel lebih akurat. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mengganti sampel seperti 4 Bakorwil lainnya di Provinsi Jawa Timur yaitu Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil III Malang, Bakorwil IV Pamekasan, ataupun Bakorwil V Jember. Peneliti selanjutnya juga bisa memilih sampel provinsi yang baru terbentuk seperti Papua Barat Daya ataupun Papua Pegunungan. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah variabel independen yang diperkirakan dapat memengaruhi Kemandirian Daerah seperti Jumlah Pengangguran, PDRB, dan Dana Bagi Hasil.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Sims, 2009, Food, place and authenticity: Local food and the sustainable tourism experience, *Journal of Sustainable Tourism*. No. 3, Vol. 17, 321–336:
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669580802359293>.
- [2] Afiah, Mulyani, & Alfian. (2020). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi: Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- [3] Agung, I Gusti Ngurah. (2014). *Manajemen Penyajian Analisis Data Sederhana: untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang Bermutu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [4] Ahmad, Srifatmawati. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kota Makassar*. *JURNAL EKONOMIKA*, 5 (1).
- [5] Aisyah, Siti. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012-2018*. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1 (2).
<https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.314>
- [6] Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2020). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Akbar, Bahrullah. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Konsep dan Teori*. Jakarta: Bumi Metro Raya.
- [8] Amalia N., Afifah Fauziah & Haryanto. (2019). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8 (2).
- [9] Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UBPress.
- [10] Bastian, Indra. (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Ghozali, Imam. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [12] Halim, A. & Kusufi, Muhammad Syam. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- [13] Halim, A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [15] Halim, Abdul & Kusufi, Muhammad Syam. (2013). *Teori, Konsep, Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [16] Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-145 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data
- [17] Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021. (Diakses pada 2023).
- [18] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- [19] Musfirati, Anikmah., & Sugiyanto, Hari. (2021). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. *Substansi: Sumber Artikel*
- [20] *Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 5 (1), 20-36.



- [25] Nordiawan, Deddi. (2017). Anggaran di suatu Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- [26] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah
- [27] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- [28] Priyatno, Duwi. (2022). Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier dengan SPSS dan Analisis Regresi Data Panel dengan EVIEWS. Yogyakarta: Cahaya Harapan.
- [29] Riyadi, Wulan. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, 3 (1), 298-314.
- [30] Rosadian, Aprizal., Rimansyah., & Hengki. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Media Akuntansi (Mediasi), 5 (2), 195-207.
- [31] Siregar, Syofian. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [32] Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [33] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- [34] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [35] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- [36] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .
- [37] Widarjono, Agus. (2013). Ekonometrik Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [38] Widarjono, Agus. (2015). Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [39] Zuhroh, I., & Amir, F. (2021). Ekonometrika dengan Software Eviews. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- [40] <https://bpkad.tulungagung.go.id/> (Diakses pada 2023).
- [41] <https://bppkad.kedirikota.go.id/> (Diakses pada 2023).
- [42] <https://djpk.kemenkeu.go.id/> (Diakses pada 2023).
- [43] <https://jatim.bps.go.id/> (Diakses pada 2023).
- [44] <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/> (Diakses pada 2023).
- [45] <https://pacitankab.go.id/> (Diakses pada 2023).
- [46] <https://ppid.kedirikab.go.id/> (Diakses pada 2023).
- [47] <https://ppid.magetan.go.id/> (Diakses pada 2023).
- [48] <https://ppid.ngawikab.go.id/> (Diakses pada 2023).
- [49] <https://trenggalekkab.go.id/> (Diakses pada 2023).
- [50] <https://www.bps.go.id/> (Diakses pada 2023).
- [51] <https://www.tripadvisor.co.id/> (Diakses pada 2023).



.....
HALAMAN INI SENGAJA
DIKOSONGKAN